

LAPORAN AKHIR

KEGIATAN PEMBINAAN POKLAHSAR BIDANG P2HP

TAHUN ANGGARAN 2020

**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas ridho dan hidayahNya, sehingga dapat diselesaikannya Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2020 yang ditulis dalam bentuk Laporan Akhir Kegiatan.

Dalam Penyusunan laporan akhir ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya, untuk itu diharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan laporan ini.

Dan pada kesempatan ini juga disampaikan ucapan terima kasih semua pihak yang telah membantu selama pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan TA 2020 sehingga dapat dilaksanakan semaksimal mungkin.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK),

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KALOROTE" at the top and "PESIRAN" at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text "DINAS PERIKANAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

MARIA DESYANTI, SE
NIP. 19770317 200902 2 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Sasaran	2
1.4 Output	3
1.5 Outcome	3
Bab II	4
2.1 Pelaksanaan Kegiatan	4
2.2 Realisasi Keuangan dan Fisik	5
Bab III	7
3.1 Permasalahan	7
3.2 Pemecahan Masalah	7
Bab IV	8
4.1 Kesimpulan	8
4.2 Saran	8
Dokumentasi	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk melakukan pembinaan pelaku usaha perikanan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu lembaga pelaku usaha perikanan yang menjadikan suatu kelompok mempunyai legalitas yang benar-benar diakui oleh pemerintah seperti Koperasi dan Kelompok yang mempunyai badan hukum yang tercatat oleh KEMENKUMHAM dan menjadikan sebagai wadah untuk mencapai suatu program pemerintah dalam pengembangan usaha perikanan. Kelembagaan dicirikan dengan adanya struktur (pengurus kelompok), tujuan yang jelas, mempunyai partisipan, teknologi dan sumber daya (Teguh, 2004).

Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu kelompok yaitu dengan memberikan pembinaan dalam memberdayakan pelaku usaha perikanan yang maju mandiri sejahtera dan bermartabat dengan cara mengupayakan kelompok usaha perikanan dalam mentertibkan Administrasi kelompok, Pola pikir kelompok yang maju dan memfasilitasi program-program Pemerintah seperti Akses modal dalam bentuk pinjaman lunak yaitu Kredit Usaha Rakyat(KUR) dan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7

tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Pasal 3(d) yaitu menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha. Selain untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Undang-Undang ini berlaku juga bagi keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran (Pasal 5).

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan terhadap poklalsar yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka meningkatkan kelembagaan yang berbentuk badan hukum.
2. Memberikan informasi dalam akses permodalan.
3. Memberikan petunjuk dalam membenahi administrasi kelompok.
4. Menunjang operasional tugas dan fungsi seksi bina usaha perikanan.

1.3 Sasaran

Kelompok Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan (POKLAHSAR) Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Output

Output dari pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan ini adalah Terlaksananya Pembinaan Pelaku usaha perikanan dalam meningkatkan kelembagaan di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.5 Outcome

Outcome dari pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan ini adalah :

1. Terbentuknya kelembagaan Kelompok yang berbadan hukum
2. Terealisasi akses modal dalam bentuk pinjaman KUR dan LPMUKP
3. Penertiban Administrasi Kelompok
4. Penumbuhan Kelompok Baru
5. Pelaku usaha mempunyai izin usaha (NIB)

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 sebesar Rp. 61.237.500.- (*Enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) dengan uraian sebagai berikut :

1.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp.	3.600.000
2.	Belanja Bahan Baku Pelatihan	Rp.	16.000.000
3.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	Rp.	9.000.000
4.	Belanja Cetak	Rp.	340.000
5.	Belanja Penggandaan	Rp.	110.000
6.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	Rp.	600.000
7.	Belanja Makanan dan Minuman	Rp.	5.362.500
8.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp.	8.000.000
9.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	Rp.	2.625.000
10.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	Rp.	5.100.000

Anggaran dalam Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan ini dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pelaku usaha perikanan yang hanya dapat dilaksanakan dari bulan Februari sampai dengan bulan April hal ini dikarenakan akibat dampak pandemi Covid 19.

2.2. Realisasi Keuangan dan Fisik

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dari alokasi anggaran kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 61.237.500.- (*Enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*),- direalokasi sebesar Rp. 5.856.950.- (*Lima Juta delapan ratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah*).-

Adapun realisasi keuangan dan fisik kegiatan dapat dilihat pada table 2 di bawah ini.

Tabel. 1. Tabel realokasi anggaran.

N o	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pembinaan Kelembagaan dan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	61.237.500	5.856.950	Realokasi anggaran kegiatan untuk pemulihan ekonomi masyarakat dampak covid 19

Tabel. 2. Tabel realisasi anggaran.

no	Kegiatan	Pagu anggaran	Realisasi keuangan	Realisasi fisik
1.	Pembinaan Kelembagaan dan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	5.856.950	5.856.950	-

BAB III

PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

3.1 Permasalahan

Banyak Kegiatan yang tidak terealisasi pada anggaran Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan TA 2020 ini dikarenakan Pandemi Covid 19 yang tertuang pada peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 yang menyebabkan tidak dibolehkannya diadakan suatu kegiatan yang menyebabkan keramaian (jaga jarak).

Adapun kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan hal tersebut adalah :

1. Melaksanakan sosialisasi Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan.
2. Melakukan pembinaan kepada Poklamsar secara rutin.

3.2 Pemecahan Masalah

Untuk tahun anggaran selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tentang kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan Pembinaan Kelembagaan dan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan baik Daerah maupun Pusat yang dapat dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Untuk maksimalnya kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dukungan dari semua pihak mulai dari seluruh lapisan masyarakat, pihak swasta dan terutama pemerintah. Dukungan anggaran yang memadai juga sangat dibutuhkan sehingga seluruh pelaku usaha perikanan khususnya Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan mendapatkan informasi perihal kelembagaan dan keberlanjutan usaha sehingga berimplikasi terhadap kesejahteraan pelaku usaha tersebut.

4.2 Saran

Untuk pengembangan dan peningkatan dalam penguatan kelembagaan di tahun-tahun selanjutnya disarankan :

- a. Pembinaan Pelaku Usaha dalam Penguatan Kelembagaan.
- b. Pelatihan administrasi kelompok.
- c. Pengembangan usaha dalam akses modal.
- d. Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan.